



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan limpahan taupik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 telah diselesaikan.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Kesehatan telah menyusun Rencana Kerja (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2024.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat pada tahun 2024. Rencana Kerja (Renstra) Dinas kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai pedoman perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dalam menyusun program dan

kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama satu tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tabalong baik untuk jajaran kesehatan, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya.

Tanjung, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tabalong



H. Hamrani, S.Kep, Ns, SH, MM, MH.

Pembina

NIP. 19720418 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan menyelenggarakan pelayanan publik daerah.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 secara garis besar memuat rancangan program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2024 serta pendanaan indikatif baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja merupakan rancangan usulan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun 2024 dengan target yang terukur serta telah disesuaikan berdasarkan prioritas dan strategi utama guna mendukung visi dan misi Dinas Kesehatan. Pengajuan Renja ini telah disusun secara realistis untuk mencapai tujuan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan adalah :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
13. Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
14. Undang – Undang Nomor Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor Seri 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Tanjung, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan mengacu pada prioritas program Dinas Kesehatan tahun 2024 yang merupakan Dokumen Perencanaan Urusan Pemerintahan Wajib Kesehatan yang meliputi Organisasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan berpedoman Program Indikatif Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan adalah sebagai bahan pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 bidang Kesehatan. Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan ini diharapkan sudah mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dinas Kesehatan sudah berusaha mengakomodir usulan Musrenbang desa dan kecamatan, namun sehubungan dengan keterbatasan pagu anggaran yang ada di SKPD Dinas Kesehatan maka tidak semua usulan di Musrenbang kecamatan dapat terakomodir sehingga yang dimasukan merupakan usulan yang super prioritas dari usulan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

(berisi latar belakang kenapa RENJA SKPD disusun, al. Meliputi urgensi/pentingnya SKPD dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah (RPJMD) dll.)

B. Dasar Hukum

(berisi peraturan perundangan yang menjadi dasar eksistensi SKPD dan penyusunan Renja SKPD, mulai dari UU, PP, dan Perda).

C. Maksud dan Tujuan

(berisi uraian maksud dan tujuan disusunnya Renja SKPD).

D. Sistematika Penulisan

(berisi urutan Bab dan sub bab penyusunan Renja).

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Pencapaian Renstra.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

C. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

D. Review terhadap Rencana awal RKPD

E. Perihal Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

C. Program dan kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Pencapaian Renstra.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong tahun 2023 (kegiatan tahun 2024 masih berjalan) tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2020-2024.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.792.733.980	64.757.469.146	69,79
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.957.079.387	63.778.861.252	87,42
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.276.443.487	3.755.473.673	71,17
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	468.936.620	176.131.000	37,56
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	494.533.817	411.670.075	83,24
TOTAL	171.989.727.291	132.879.605.146	77,26

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.1.1 Angka Kematian

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu. Mortalitas atau kejadian kematian dalam suatu masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat, keberhasilan pelayanan kesehatan dan keberhasilan program-program pembangunan kesehatan lainnya. Pada bagian ini kita dapat melihat bagaimana gambaran kejadian kematian dalam periode tahun terakhir di Kabupaten Tabalong.

Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 Kelahiran Hidup.

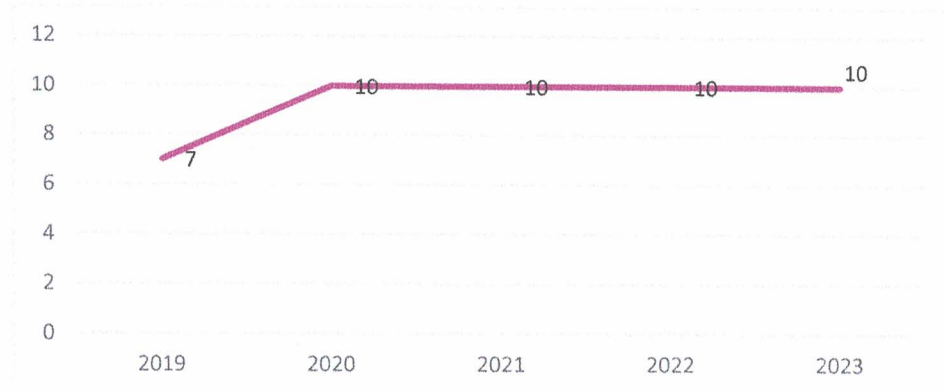
Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat sehingga banyak program kesehatan yang ada ditujukan untuk menurunkan AKB ini. AKB ini didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu rendah jika AKB kurang dari 20; sedang 20-49, tinggi 50-99 dan sangat tinggi jika AKB di atas 100 per 1000 kelahiran hidup (Depkes, 2009). Berdasarkan klasifikasi tersebut maka AKB di Kabupaten Tabalong termasuk dalam klasifikasi rendah.

Angka kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tabalong tahun 2023 adalah 10 per 1000 Kelahiran Hidup, jumlah yang sama dengan tahun 2022 yang sebesar 10 per 1000 Kelahiran Hidup. Data selengkapnya dapat di lihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.1

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
di Kabupaten Tabalong Tahun 2019 s/d 2023



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Hasil dari analisis kasus kematian bayi yang ada, lebih dari setengahnya dikarenakan BBLR/Asfeksia, dimana kematiannya di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit/Klinik) dan ada juga kasus yang meninggal di rumah dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. Penyebab kelahiran BBLR/prematur di kabupaten Tabalong sebagian besar karena umur kehamilan ibu belum cukup bulan (<37-40 minggu), sebelum masa kehamilan mencapai 37 minggu sudah terjadi persalinan. Hal ini menyebabkan bayi yang dilahirkan memiliki Berat Badan Lahir Rendah (<2500 gram) dan disertai organ tubuh bayi belum cukup matang yang menjadi salah satu faktor resiko tinggi penyebab kematian bayi.

Jumlah Kematian Ibu/Angka Kematian Ibu (AKI)

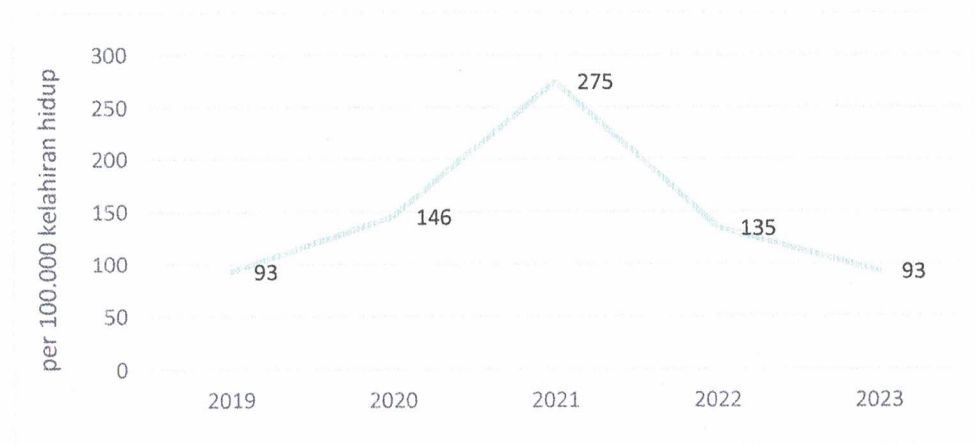
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan)

tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup (DepKes 2009). Angka Kematian Ibu secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebanyak 3 orang dari 3.243 kelahiran hidup, setara dengan 93 per 100.000 Kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 yang sebesar 135 per 100.000 Kelahiran hidup atau dengan jumlah kematian ibu sebanyak 5 orang.

Gambaran angka kematian ibu sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.2
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tabalong Tahun
2019 s/d 2023

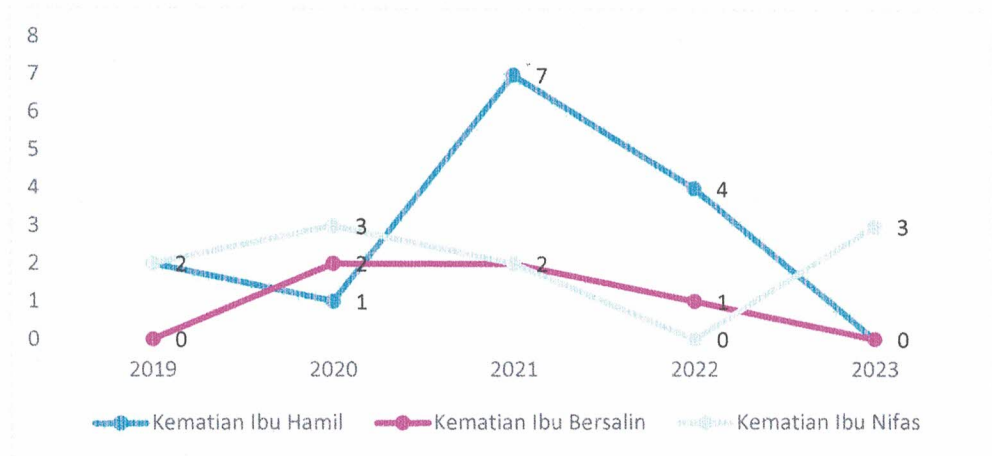


Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI), di Indonesia sejak tahun 2007 telah dikembangkan

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Untuk mengetahui data kematian ibu per puskesmas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, dan Ibu Nifas Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2023



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

Dari kematian ibu di kabupaten Tabalong yang berjumlah 3 kasus semuanya sudah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar kualitas, yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10T selama kehamilannya. Berdasarkan penyebab kematian ibu yang ada tahun 2023, 2 orang disebabkan Eklamsi, dan sisanya karena gangguan darah.

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI), di Indonesia sejak tahun 2007 telah dikembangkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Penurunan Angka Kematian Ibu
2. Penurunan Angka Kematian Bayi
3. Penurunan Stunting;
4. *Universal Health Coverage* (UHC) / Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Rasio Dokter Terhadap Jumlah Penduduk
6. Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Obat Esensial
7. Nilai AKIP

2.4 Review terhadap Rencana awal RKPD

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal maupun eksternal organisasi dengan memperhatikan kebutuhan Renstra Dinas kesehatan kab.Tabalong stakeholders, akan dapat di ketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menghadang organisasi.

Analisis lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespon setiap perkembangan zaman. Lingkungan internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi, sumberdaya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Pemahaman terhadap lingkungan internal akan memberikan pemahaman kepada organisasi akan kondisi dan kemampuan organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi di sekeliling organisasi yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Salah satu metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah metode SWOT.

a. Analisis Eksternal

Berbagai kecenderungan pembangunan terkait dengan sector Kesehatan, berbagai kecenderungan mengkhawatirkan di sector kesehatan antara lain : Ancaman penyakit menular, HIV/AIDS masih ada yang belum terdeteksi dan semakin meningkatnya penyakit tidak menular yang dapat menyebabkan stroke dan penggunaan narkoba menunjukkan kenaikan.

Namun disamping itu ada kecenderungan yang positif di sector kesehatan antara lain : semakin meningkatnya perhatian pemerintah terutama untuk masyarakat miskin dan penanggulangan **masalah sustainable Development Goals** semakin meningkatnya peran masyarakat dan swasta sehingga meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di sertai dengan adanya peningkatan terhadap sarana dan prasarana.

b. Analisis Internal

Analisis internal menggunakan konsep *value chain*, dalam model ini keadaan internal Dinas Kesehatan Kab.tabalong di nilai menggunakan fungsi manajemen dan system pendukung manajerial.

Fungsi manajemen :

Kelemahan : belum mempunyai rencana strategi untuk perencanaan

Kekuatan: mempunyai minat dan motivasi kuat untuk meningkatkan perencanaan dalam rangka menjalankan visi misi dinas kesehatan.

System Pendukung Manajemen

Manajemen SDM :

Kelemahan :Penyebaran SDM yang kurang merata di berbagai UPT Puskesmas dan belum optimalnya pelaksanaan rotasi dan mutasi petugas.

Kekuatan :Kualitas SDM yang bagus; adanya komitmen,loyalitas dan integritas yang tinggi

System Keuangan dalam pelayanan

Kelemahan : system keuangan UPT Puskesmas masih menggunakan pola birokrasi, Tarif perda UPT Puskesmas sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Manajemen Informatika

Kelemahan : Tidak ada kasi khusus menangani SIK dan belum mempunyai system pelaporan online yang baik

Kekuatan : adanya motivasi kuat untuk mengembangkan SIK

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
TAHUN 2024

A. Tujuan dan Sasaran Target Kinerja SKPD 2024

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tabalong 2020 – 2024 maka tujuan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tabalong secara umum adalah untuk Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Tabalong. Adapun sasaran kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP	BB
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	130
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	8
		UHC	100
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	9,5
		Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	1 : 2.500
		Persentase Faskes dengan ketersediaan obat esensial	100

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang dirumuskan dalam RPJMD adalah Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan kebijakan :

- Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Meningkatkan serta peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan

C. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Non Urusan								
-								
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	228.017.000	APBD		10	250.818.700
1.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	155.997.000	APBD		12	171.596.700

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET KINERJA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	18.759.000	APBD			1	20.634.900
1.2.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	223.811.916	APBD			3	246.193.108
1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	157.211.883	APBD			3	172.933.072
1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	18.234.548	APBD			12	20.058.003
1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.082.168.000	APBD			12	1.190.384.800
1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.2.07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	643.754.479	APBD			20	708.129.927

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	471.900.000	APBD		12	519.090.000
1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.670.146.180	APBD		12	1.837.160.798
1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	661.220.000	APBD		10	727.342.000
1.2.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	175.000.000	APBD		1	192.500.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA			TARGET KINERJA	ANGGARAN
Urusan									
Wajib									
2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2.2.01.1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	31.424.221.908	APBD			1	34.566.644.099
2.2.01.2 Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	10.001.950.000	APBD			1	11.002.145.000
2.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	2.203.418.000	APBD			10	2.423.759.800

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100%	12.924.884.626	APBD		1	14.217.373.089
2.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1	23.080.000	APBD		1	25.388.000
2.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100%	74.000.000	APBD		1	81.400.000
2.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	3.233.700.000	APBD		1	3.557.070.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.01.24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		23.101.000	APBD			25.411.100
2.2.01.26 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	18	608.276.000	APBD		18	669.103.600
2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.2.02.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4778	142.850.512	APBD		4778	157.135.564
2.2.02.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3700	103.852.552	APBD		3700	114.237.808
2.2.02.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3457	74.000.000	APBD		3457	81.400.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.02.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19367	177.677.920	APBD		19367	195.445.712
2.2.02.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43561	105.967.634	APBD		43561	116.564.398
2.2.02.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20006	92.712.000	APBD		20006	101.983.200
2.2.02.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	167922	148.865.325	APBD		167922	163.751.858
2.2.02.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17230	73.952.000	APBD		17230	81.347.200
2.2.02.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Pelayanan	3482	73.991.000	APBD		3482	81.390.100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET KINERJA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
		Kesehatan Penderita Diabetes Militus							
2.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	372	18.436.000	APBD	372		372	20.279.600
2.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	860	92.484.592	APBD	860		860	101.733.052
2.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42	64.452.000	APBD	42		42	70.897.200
2.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	46.236.000	APBD	12		12	50.859.600

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	122.078.770	APBD		1	134.286.647
2.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	158.187.396	APBD		4	174.006.136
2.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10	138.750.000	APBD		10	152.625.000
2.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	166.782.964	APBD		3	183.461.261
2.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	94.417.000	APBD		1	103.858.700
2.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	73.992.000	APBD		12	81.391.200
2.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	236368	46.250.000	APBD		236368	50.875.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET KINERJA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	36.959.000	APBD	0		0	40.654.900
2.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	115.432.000	APBD	1		1	126.975.200
2.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	138.166.000	APBD	4		4	151.982.600
2.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	35.956.493.000	APBD	1		1	39.552.142.300
2.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20	90.120.000	APBD	20		20	99.132.000
2.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	8	138.750.000	APBD	8		8	152.625.000
2.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	296.930.000	APBD	12		12	326.623.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET KINERJA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1.836.107.000	APBD			1	2.019.717.700
2.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18	175.857.000	APBD			18	193.442.700
2.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	61.910.000	APBD			12	68.101.000
2.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52	108.946.000	APBD			52	119.840.600
2.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	829.615.700	APBD			1	912.577.270

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	225	64.758.000	APBD		225	71.233.800
2.2.02.43 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Dinas Kesehatan	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7	103.271.000	APBD		7	113.598.100
2.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
2.2.03.2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	72.408.000	APBD		1	79.648.800
2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.2.04.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	18	143.372.000	APBD		18	157.709.200

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET KINERJA	ANGGARAN
3.2.02.1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan sumber Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	93.727.000	APBD		1	103.099.700
3.2.02.2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1	7.271.985.000	APBD		1	7.999.183.500
3.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
3.2.03.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50	620.941.000	APBD		50	683.035.100
4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT								

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET KINERJA	ANGGARAN
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
4.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
4.2.01.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80	32.300.743	APBD		80	35.530.818
4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan								

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)				CATATAN PENTING		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA				TARGET KINERJA	ANGGARAN
4.2.03.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	120	78.171.400	APBD				120	85.988.540
4.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah										
4.2.06.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80	69.214.250	APBD				80	76.135.675

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)				CATATAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET PENTING		TARGET KINERJA	ANGGARAN
5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
5.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
5.2.01.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	41.623.950	APBD				1	45.786.345

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong menyajikan uraian Tentang Kinerja instansi Dinas Kesehatan dalam hal Perencanaannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini jauh dari sempurna oleh karena itu kami membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama yang optimal dari berbagai pihak untuk mendukung perbaikan penyusunan ditahun-tahun mendatang.

Tanjung, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tabalong,



H. Hamrani, S.Kep, Ns, SH, MM, MH.
NIP. 19720418 199303 1 006